

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 14

TAHUN 2004

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR**

NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG

**STRATEGI PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap eksistensinya, cita-cita dan sikap tingkah lakunya dalam memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. bahwa saat ini di berbagai daerah sering terjadi konflik yang di latar belakanginya oleh agama dan kesukuan, hal ini akan mengganggu dan apabila tidak segera ditanggulangi akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  - c. bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut khususnya di Kabupaten Cianjur, diperlukan strategi dan langkah-langkah yang bersifat preventif dan persuasif, dalam rangka memelihara stabilitas sosial politik yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala aspek kehidupan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b dan c serta sebagai landasan hukum dan pedoman bagi aparat serta masyarakat, perlu dikeluarkan Keputusan Bupati tentang Strategi Pemantapan Wawasan Kebangsaan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22A Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005;
8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi di Kabupaten Cianjur.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STRATEGI PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Wawasan Kebangsaan adalah tekad untuk hidup sebagai suatu bangsa dalam suatu Negara yang sama, terlepas dari perbedaan etnis/ras, agama ataupun golongan, dengan memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah bangsa lain;

- f. Strategi Pemantapan Wawasan Kebangsaan adalah langkah-langkah wawasan kebangsaan yang diambil untuk membangun pemantapan wawasan kebangsaan dalam suatu daerah.

Pasal 2

Strategi pemantapan wawasan kebangsaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Strategi pemantapan wawasan kebangsaan merupakan pedoman bagi pemerintah maupun masyarakat, yang disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat/agama, tokoh pendidik dan birokrat.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Mei 2004

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**WASIDI SWASTOMO**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH,



**SUBARNA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 14 TAHUN 2004 SERI  
D3.

21

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR**  
**NOMOR 06 TAHUN 2004**

**TENTANG**  
**STRATEGI PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN**  
**DAFTAR ISI**

	Halaman
Kata Pengantar .....	1
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pengertian .....	2
1.2.1. Wawasan Kebangsaan .....	2
1.2.2. Strategi .....	2
1.2.3. Strategi Pemantapan Wawasan Kebangsaan .....	2
1.3. Gambaran Umum .....	2
BAB II Kondisi dan Potensi Daerah .....	4
2.1. Wilayah .....	4
2.1.1. Geografis dan Demografis .....	4
2.1.2. Pemerintahan .....	6
2.2. Kondisi Poleksosbud Hankam dan Agama .....	7
2.2.1. Politik .....	7
2.2.2. Sosial Ekonomi .....	10
2.2.3. Sosial .....	11
2.2.4. Budaya .....	12
2.2.5. Pertahanan dan Keamanan .....	14
2.2.6. Agama .....	15
BAB III Visi dan Misi .....	17
3.1. Visi .....	17
3.2. Misi .....	18
BAB IV Analisis Internal dan Eksternal .....	20
4.1. Analisis Internal .....	20
4.1.1. Kekuatan .....	20
4.1.2. Kelemahan .....	20
4.2. Analisis Eksternal .....	20
4.2.1. Peluang .....	21
4.2.2. Ancaman .....	21
BAB V Tujuan dan Sasaran .....	22
5.1. Tujuan .....	22
5.2. Sasaran .....	22
BAB VI Strategi .....	23
Tabel Kerangka Perumusan Strategi .....	25
BAB VII Penutup .....	27

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan berkah, anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha kuasa atas perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Dari periode ke periode sejak kemerdekaan, pembangunan terus berlangsung dengan berbagai dinamika. Meskipun seluruh rakyat dan penyelenggara negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan kokohnya NKRI, namun dalam perkembangan dewasa ini masih tetap ada ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan NKRI. Konflik sosial dan menguatnya gejala disintegrasi bangsa di berbagai daerah merupakan ancaman terhadap keutuhan NKRI yang apabila tidak segera ditanggulangi akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kasus kerusuhan di Ambon yang bernuansa agama, kerusuhan di Poso yang berlatar belakang kesukuan, konflik dengan Gerakan Sparatis Aceh/Gerakan Aceh Merdeka yang berkepanjangan serta munculnya gerakan Papua Merdeka dan sejumlah konflik lainnya di belahan Nusantara ini, merupakan fakta bahwa disintegrasi bangsa semakin mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai masalah mendasar yang memunculkan fenomena disintegrasi bangsa ini adalah makin menguatnya pandangan-pandangan sempit seperti primordialisme serta semangat dan fanatisme kedaerahan. Sebagai akibat lebih jauh adalah berkurangnya semangat dan wawasan kebangsaan sehingga dalam kondisi seperti itu sangat rentan terhadap terjadinya disintegrasi bangsa. Untuk itu diperlukan strategi dan langkah-langkah taktis yang bersifat preventif dan persuasif dalam rangka memelihara stabilitas sosial politik yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala aspek kehidupan. Dalam hubungan itu, Kabupaten Cianjur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, mengambil inisiatif untuk meningkatkan kewaspadaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemantapan wawasan kebangsaan Indonesia bagi segenap jajaran aparat dan seluruh masyarakat, sehingga memunyai kemampuan daya tangkal terhadap berbagai ancaman disintegrasi bangsa serta tidak mudah

terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat provokatif yang pada akhirnya akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

## 1.1. Pengertian

- 1.1.1. **Wawasan Kebangsaan** adalah tekad untuk hidup sebagai suatu bangsa dalam suatu negara yang sama, terlepas dari perbedaan Etnis/Ras, Agama ataupun Golongan, dengan memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah bangsa lain. Dalam pengertian lain, wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap eksistensinya, cita-cita dan sikap serta tingkah lakunya dalam memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- 1.1.2. **Strategi adalah** adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan.
- 1.1.3. **Strategi Pemantapan Wawasan Kebangsaan** adalah langkah-langkah wawasan kebangsaan yang diambil untuk membangun pemantapan wawasan kebangsaan dalam suatu daerah.

## 1.2. Gambaran Umum

Jika ditelusuri perjalanan sejarah, konsepsi Wawasan Kebangsaan Indonesia berakar dari telah terwujudnya satu kesatuan kepulauan Nusantara dalam wilayah Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 dan kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai 14. Kedua Kerajaan tersebut secara de facto telah membuktikan kesatuan Nusantara sebagai wilayah yang berada dalam satu kekuasaan. Perbedaan Ras, Agama, Bahasa dan Etnis mulai dilepaskan pada tahun 1365 dengan lahirnya motto pemersatu *Bhinneka Tunggal Ika*. Dalam perkembangan sejarah berikutnya disintegrasi dialami sebagai akibat penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Belanda, Inggris). Kesadaran kebangsaan Indonesia bangkit kembali sejak 1908 (gerakan Budi Utomo) yang dimantapkan pada tahun 1928 (Sumpah Pemuda) dan mulai terwujud sejak 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka dan berdaulat, telah

dilaksanakan pembangunan di segala bidang secara bertahap dan berkelanjutan. Seluruh rakyat, penyelenggara negara dan segenap potensi bangsa telah terikat dalam satu komitmen nasional untuk berusaha menegakkan dan melestarikan NKRI. Namun memperhatikan kecenderungan yang ada, baik pada masa sekarang maupun gejala-gejala di masa mendatang, ternyata dihadapkan pada tantangan yang cukup berat dalam menjaga dan melestarikan keutuhan NKRI.

Potensi atas kekayaan kemajemukan masyarakat Indonesia, di dalamnya mengandung benih konflik. Otonomi Daerah yang belum sepenuhnya terwujud, kebijakan yang terkesan masih terpusat dan otoriter serta tindakan ketidakadilan pemerintah yang dipicu oleh hasutan serta pengaruh gejolak politik internasional, dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa. Konflik sosial di berbagai daerah merupakan gangguan bagi keutuhan NKRI. Jika tidak segera ditanggulangi niscaya dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Tuntutan kemerdekaan dari sebagian masyarakat di beberapa daerah merupakan ekspresi ketidakpuasan masyarakat daerah tersebut terhadap kebijakan pemerintah pusat. Berbagai hal tersebut merupakan tantangan yang harus dikelola dan ditindaklanjuti dengan cepat, tepat dan menyentuh substansi permasalahannya secara nyata. Bila tidak dapat dikelola dengan baik akan sangat berbahaya bagi kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa dan negara.

Tumbuh dan berkembangnya partai politik dan organisasi massa yang berorientasi pada penonjolan agama, etnis, dan kedaerahan merupakan tantangan yang cukup berat dalam mewujudkan sistem politik yang stabil, transparan, demokratis, dan tetap dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Banyaknya kasus yang lebih mengedepankan dan bahkan memenangkan kepentingan politik daripada penghargaan atas hukum, hak asasi manusia dan persatuan serta kesatuan merupakan sedikit contoh betapa kerasnya usaha yang harus diperjuangkan dalam menegakkan demokrasi dan mempercepat proses demokratisasi yang sejalan dengan perjalanan bangsa dan negara. Kondisi stabilitas politik serta keamanan yang kurang menggembarakan, ternyata sangat berpengaruh negatif terhadap citra Indonesia di dunia internasional. Politik luar negeri merupakan refleksi dari politik dalam negeri. Maka setiap dinamika dalam negeri akan mempengaruhi diplomasi sebagai manifestasi politik luar negeri. Karenanya, tidaklah berlebihan bila kerusuhan sosial dan etnis serta

pelanggaran hukum dan HAM telah menarik mundur atau setidaknya telah mengakibatkan penundaan dukungan internasional terhadap upaya pemulihan ekonomi, social, dan politik bagi Indonesia.

## BAB II KONDISI DAN POTENSI DAERAH

### 2.1 Wilayah

#### 2.1.1. Geografis dan Demografis

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 350.148 hektar. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur berdasarkan hasil Sensus Penduduk ( SP ) 2000 sebanyak 1.931.840 jiwa, terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 982.164 jiwa dan perempuan sebanyak 949.676 jiwa, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ) pada tahun 2002 sebesar 1,60 %,

Secara geografis dan demografis, dapat dibedakan dalam 3 daerah pembangunan yakni :

- *Wilayah Utara* meliputi 13 kecamatan yakni : Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung, Mande, Cikalongkulon, Cugenang, Sukaresmi, Pacet. Kepadatan penduduk sekitar 63,90% dengan luas wilayah 104,74Km2 atau 30,78%. Laju Pertumbuhan Ekonominya sekitar 2,03%.
- *Wilayah Tengah* meliputi 7 kecamatan yakni : Sukanagara, Takokak, Campaka, Tanggeung, Pagelaran, Kadupandak, dan Campakamulya Kepadatan penduduk 19,19% dengan luas wilayah 998,97Km2 atau 28,25% . Laju Pertumbuhan Ekonominya sekitar 1,81%.
- *Wilayah Selatan* meliputi 6 kecamatan yakni : Cibinong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, dan Cikadu. Kepadatan penduduk 17,12% dengan luas wilayah 1.425,53Km2 atau 40,70%. Laju Pertumbuhan Ekonominya sekitar 2,34% .

Ketimpangan perkembangan wilayah terjadi karena jumlah dan mutu infra struktur serta aktivitas ekonomi yang masih terbatas di wilayah tengah dan selatan.

Cianjur sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Barat dan ibu kota negara merupakan titik temu kegiatan masyarakat dari kedua ibu kota tersebut. Kondisi seperti itu mempunyai dampak menonjol dalam segala aspek kehidupan.

### 2.2.2 Pemerintahan

Secara administrative pemerintahan, Kabupaten Cianjur terdiri dari 26 kecamatan, 338 desa, dan 6 kelurahan di wilayah kota Cianjur dengan batas-batas administratif :

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Purwakarta.
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia (Hindia Belanda)
- Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Garut.

Tingginya semangat demokrasi di kalangan masyarakat menuntut penyelenggara pemerintahan untuk lebih transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Transparansi ini pada akhirnya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dengan mendasarkan kepada asas manfaat serta membudayakan “amar makruf nahyi mungkar “, baik antara anggota masyarakat, maupun antara anggota masyarakat dengan pemerintah, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian prinsip-prinsip Good Governance akan terwujud dalam pembangunan yang berwawasan kebangsaan.

Untuk mendukung jalannya pembangunan masyarakat dengan karakteristik tersebut, maka pemerintah harus memiliki karakter yang relevan. Model sistem pemerintahan yang relevan dalam konteks ini adalah keteladanan dengan sikap *jujur* (shidiq) *akuntable* (amanah) *transparan* (tablig) dan memiliki kualitas, kapasitas dan kompetensi yang tinggi (fathonah). Selain dari itu, pemerintah harus mampu menggerakkan peran serta masyarakat

dengan sikap egaliter dan adil dalam mengambil kebijakan serta berorientasi kepada pengabdian dan pelayanan.

## 2.2 Kondisi POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PERTAHANAN KEAMANAN DAN AGAMA .

### 2.2.1 Politik

Perkembangan kehidupan demokrasi di Kabupaten Cianjur sejak bergulirnya era reformasi mengalami berbagai perubahan. Perkembangan positif tergambar antara lain dari terselenggaranya Pemilu pada tahun 1999 secara aman, demokratis, jujur, dan adil. Jumlah perolehan suara peserta Pemilu 1999 sebanyak 983.786 orang/jiwa.

Dari jumlah Hak Pilih pada Pemilu Tahun 1999 sebanyak 1.100.330 orang, ternyata yang melaksanakan hak pilihnya sebanyak 983.786 orang atau 90 % dari jumlah hak pilih.

Jumlah suara yang diperoleh masing-masing Partai Politik Pemilihan Umum 1999 dengan komposisi sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Partai Indonesia Baru	1.869
2	Partai Keristen Nasional Indonesia	1.148
3	Partai nasional Indonesia	3.421
4	Partai Aliansi democrat Indonesia	637
5	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia	2.047
6	Partai Umat Islam	4.076
7	Partai Kebangkitan Umat	1.616
8	Paratai Masyumi Baru	1.460
9	Partai Persatuan Pembangunan	245.479
10	Partai Syarikat Islam Indonesia	5.234
11	PDI Perjuangan	242.880
12	Partai Abul Yatama	1.655
13	Partai kebangkitan Merdeka	1.544
14	Parati Demokrasi Bangsa	871
15	Parati Amanat nasional	23.256
16	Partai Rakyat Demokratik	330
17	Partai Syarikat Islam Indonesia-1905	6.994
18	Partai Katolik Demokrat	177
19	Parati Pilhan Rakyat	188
20	Partai Rakyat Indonesia	317

21	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi	5.236
22	Partai Bulan Bintang	40.091
23	Partai Solidaritas Pekerja	382
24	Partai keadilan	6.764
25	Partai nadatul Umat	16.465
26	PNI Front Marhaenis	3.148
27	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	2.382
28	Partai Republik	768
29	Partai Islam Demokrat	471
30	Partai Massa Marhaen	2.743
31	Partai Murba	625
32	Partai demokrasi Indonesia	3.275
33	Partai Golkar	289.876
34	Partai Persatuan	9.065
35	Partai kebangkitan Bangsa	34.786
36	Partai Uni Demokrasi Indonesia	1.052
37	Partai Buruh Nasional	488
38	Partai MKGR	1.312
39	Partai Daulat Rakyat	1.458
40	Partai Cinta Damai	385
41	Partai Keadilan dan Persatuan	12.079
42	Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia	298
43	Partai Nasional Bangsa Indonesia	1.501
44	Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia	1.298
45	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia	1.219
46	Partai Nasional Demokrat	839
47	Partai Umat Muslim Indonesia	255
48	Partai Pekerja Indonesia	382

( Sumber : PPD Tingkat II Kabupaten Cianjur Tahun 1999 )

Demokratisasi juga terlihat dari aktivitas politik masyarakat yang meningkat dengan munculnya partai-partai politik baru sebagai cerminan keinginan berbagai kelompok masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi politiknya. Sampai bulan September 2003 tercatat 62 Partai Politik yang ada di Kabupaten Cianjur. Sedangkan dalam menghadapi Pemilu 2004, sudah tercatat sebanyak 24 Partai Politik peserta Pemilu 2004 antara lain:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2. Partai Buruh Sosial Demokrat
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Merdeka
5. Partai persatuan Pembangunan
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
9. Partai Demokrat

10. Partai keadilan dan Persatuan Indonesia
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia
13. Partai Amanat Nasional
14. Partai Karya Peduli Bangsa
15. Partai Kebangkitan Bangsa
16. Partai Keadilan Sejahtera
17. Partai Bintang Reformasi
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19. Partai Damai Sejahtera
20. Partai Golongan Karya
21. Partai Patriot Pancasila
22. Partai Syarikat Indonesia
23. Partai Persatuan Daerah
24. Partai Pelopor.

Dinamika dan perhatian masyarakat Kabupaten Cianjur terhadap pemilihan umum sangat tinggi, Indikasi ini dapat dilihat dari banyaknya pendapat dan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat, birokrat, cendekiawan, politisi dan lain-lain, bahwa Pemilihan Umum merupakan peristiwa yang harus sukses, jelas bahwa Pemerintah dan Partai Politik peserta Pemilu sebagai wahana penyalur aspirasi masyarakat sangat bertanggung jawab atas harapan masyarakat itu. Pemilihan umum tidak lagi dianggap oleh masyarakat sebagai kegiatan rutinitas, apalagi Pemilu 1999 yang ditandai dengan makin meningkatnya keterbukaan, keberanian mengemukakan pendapat, dan daya kritis masyarakat terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu kualitas dan kejujuran penyelenggara pemilihan umum harus diwujudkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selain itu terbentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan baru, berbagai komite kepedulian dan LSM, berkembangnya berbagai diskusi, dialog dan pernyataan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada lembaga legislatif maupun eksekutif turut mewarnai maraknya aktivitas sosial politik dewasa ini. Hal-hal tersebut di atas merupakan indikator-indikator penting dari perkembangan positif kehidupan politik dalam menuju suasana kehidupan demokrasi.

Di bidang media massa juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Jika sebelum era reformasi jumlah wartawan yang bertugas di Cianjur sebanyak 23 orang, namun saat memasuki era reformasi meningkat menjadi 119 orang. Meskipun demikian, perkembangan secara kuantitas keanggotaan wartawan ini, disatu sisi dapat mendorong peningkatan keterbukaan dan sosial kontrol, namun disisi lain tidak sedikit kalangan pers yang kurang memperhatikan kode etik jurnalistik di dalam menyajikan tulisan pemberitaannya. Minat untuk mengelola penerbitan daerah pada awal-awalnya cukup besar dengan terbitnya surat-surat kabar lokal Cianjur. Namun karena tidak memperhatikan basic segment/pembaca/pelanggan yang dapat menjaga kontinuitas biaya penerbitan, pada akhirnya satu persatu penerbitan lokal itu gulung tikar.

Permasalahan utama dari krisis multi dimensional saat ini antara lain karena lemahnya penegakkan hukum. Kurang adanya keberanian aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan perundang undangan dan juga dikarenakan budaya hukum masyarakat yang kurang menjunjung tinggi supremasi hukum. Masalah-masalah lain yang muncul di Kabupaten Cianjur selain masalah hukum, juga masalah sosial yang disebabkan pada kesenjangan aktivitas ekonomi yang terbatas di Wilayah Cianjur Tengah dan Cianjur Selatan.

### 2.2.2. Sosial Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi nasional. Fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional, sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Ketika krisis moneter dan ekonomi mulai melanda Indonesia pada tahun 1997 – 1998 dan berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, maka pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sejumlah sektor strategis di Kabupaten Cianjur menurun drastis dari sekitar 6 - 7 % menjadi berada pada titik nol, kecuali sektor pertanian yang pada saat itu mampu bertahan sampai 3 %. Pada tahun 2002 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berdasar pada harga konstan sebesar 3,92 %. Laju Pertumbuhan Ekonomi ( LPE ) berdasarkan harga berlaku sebesar 14,79 %. Jatuhnya Laju Pertumbuhan Ekonomi ini berpengaruh

pula terhadap kemampuan daya beli masyarakat serta berkurangnya kemampuan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.

Kondisi sosial ekonomi penduduk di Kabupaten Cianjur berdasarkan data statistik yang ada sampai akhir tahun 2002, tercatat :

1. *Penduduk Miskin* sebanyak 368.627 orang atau 18,49% dari total jumlah penduduk Kabupaten Cianjur.
2. *Penduduk Tidak Miskin* sebanyak 1,625.100 orang atau 81,51% dari total jumlah penduduk Kabupaten Cianjur.

### 2.2.3. Sosial

Potensi atau kekuatan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Cianjur di samping memiliki kekayaan alam anugerah Tuhan yang begitu besar dan masyarakatnya, juga memiliki keinginan membangun dan kepedulian yang tinggi. Budaya kebersamaan, jiwa yang religius dan sikap bersaing sudah tumbuh dan berkembang. Masyarakat Kabupaten Cianjur pada umumnya taat menjalankan ibadah dan dengan datangnya era kesejagatan, keterbukaan serta kompetisi global, sikap bersaing pada berbagai komponen masyarakat Kabupaten Cianjur mulai tumbuh.

Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur secara kuantitatif, belum terimbangi dengan peningkatan secara kualitatif. Hal ini terlihat dari tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) sebagai salah satu indikator makro untuk mengukur tingkat pembangunan manusia yang meliputi Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Rangking Kabupaten Cianjur di Jawa Barat dalam pencapaian IPM Tahun 2002 menempati urutan ke 14 dalam status *menengah atas* dengan nilai IPM antara 66 – 80 yaitu 66,74. Klasifikasi IPM berdasarkan *Indonesia Human Development Report* Tahun 2001 adalah : Nilai IPM kurang dari 50 termasuk status rendah, Nilai IPM antara 50 – 66 termasuk status menengah bawah, nilai IPM antara 66 – 80 termasuk status menengah atas dan nilai IPM di atas 80 termasuk status tinggi.

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO  
KABUPATEN CIANJUR

INDIKATOR MAKRO	TAHUN 2001	TAHUN 2002
<b>A. SOSIAL</b>		
1. Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP )	1,66 %	1,60 %
2. Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Pendidikan :		
2.1. SD/MI	96,93 %	107,45 %
2.2. SLTP	54,03 %	80,25 %
2.3. SLTA	50,82 %	52,38 %
3. Angka Partisipasi Murni ( APM ) Pendidikan :		
3.1. SD/MI	71,05 %	73,94 %
3.2. SLTP	51,73 %	67,93 %
3.3. SLTA	19,68 %	21,00 %
4. Angka Melanjutkan Sekolah Wajar Dikdas 9 Tahun	69,47 %	80,70 %
5. Kekurangan Energi Protein ( KEP )	14,00	13,28
6. Angka Kematian Bayi ( AKB )	67,62 per-1.000 kelahiran.	67,48 per-1.000 kelahiran
<b>B. EKONOMI</b>		
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi ( LPE ) berdasarkan harga konstan	3,60 %	3,92 %
Laju Pertumbuhan Ekonomi ( LPE ) berdasarkan harga berlaku	13,06 %	14,79 %
2. PDRB-Per-Kapita berdasarkan Harga Konstan	Rp.1.091.765,91	Rp.1.118.034,66
PDRB-Per-Kapita berdasarkan Harga Berlaku	Rp.3.164.449,98	Rp.3.580.608,19
3. Laju Inflasi berdasarkan PDRB	9,14 %	10,46 %
Laju Inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen	12,20 %	10,52 %
<b>INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ( IPM )</b>	66,33	64,74

(Sumber : Booklet Potensi dan Pesona Cianjur Tahun 2003)

#### 2.2.4. Budaya

Nilai-nilai merupakan budaya yang berkembang dan diyakini sebagai nilai luhur yang harus selalu dihayati serta diamalkan oleh seluruh masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Cianjur memiliki filosofi yakni **ngaos, mamaos dan maenpo** yang mengingatkan tentang 3 (tiga) aspek keparipurnaan hidup. **Ngaos** adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakatnya yang dilekati rasa keberagaman. Citra sebagai daerah agamis ini sudah terintis sejak Cianjur ada dari ketiadaannya sekitar tahun 1677 tatar Cianjur ini dibangun oleh para ulama dan santri tempo dulu yang gencar mengembangkan syiar Islam. Itulah sebabnya Cianjur sempat mendapat julukan

gudangnya santri dan kiyai. Bila ditengok sekilas sejarah perjuangan di tatar Cianjur jauh sebelum masa perang kemerdekaan, bahwa kekuatan-kekuatan perjuangan kemerdekaan pada masa itu tumbuh dan bergolak pula di pondok-pondok pesantren. Banyak pejuang yang mohon do'a restu para kiyai sebelum berangkat ke medan perang. Mereka baru merasa lengkap dan percaya diri berangkat ke medan juang setelah mendapat restu para kiyai.

**Mamaos** adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa dan menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. Seni mamaos tembang sunda Cianjuran lahir dari hasil cipta, rasa dan karsa Bupati Cianjur R.Aria Adipati Kusumahningrat yang dikenal dengan sebutan Dalem Pancaniti. Ia menjadi Pupuhu ( Pemimpin ) tatar Cianjur sekitar tahun 1834 - 1862. Pada umumnya syair mamaos ini lebih banyak mengungkapkan puji-pujian akan kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaannya.

Sedangkan **Maenpo** adalah seni bela diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. Pencipta dan penyebar maen po ini adalah R.Djajaperbata atau dikenal dengan nama R.H.Ibrahim. Aliran ini mempunyai ciri permainan rasa yaitu sensitivitas atau kepekaan yang mampu membaca segala gerak lawan ketika anggota badan saling bersentuhan. Dalam maen po dikenal ilmu Liliwatan (Penghindaran) dan Peupeuhan ( Pukulan ).

Apabila diresapi, filosofi tersebut pada hakekatnya merupakan simbol rasa *keber-agama-an, kebudayaan, dan kerja keras*. Dengan keber-agama-an sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya keimanan dan ketakwaan masyarakat melalui pembangunan akhlak yang mulia. Dengan kebudayaan, masyarakat Cianjur ingin mempertahankan keberadaannya sebagai masyarakat yang berbudaya, memiliki adab, tata krama dan sopan santun dalam tata pergaulan hidup. Pada zaman dulu masyarakat Cianjur dikenal dengan sikap prilakunya yang sopan santun serta tutur bahasa yang halus. Dengan kerja keras sebagai implementasi dari filosofi maenpo, masyarakat Cianjur selalu menunjukkan semangat keberdayaan yang tinggi dalam meningkatkan mutu kehidupan. Liliwatan, tidak semata-mata permainan bela diri dalam pencak silat, tetapi juga ditafsirkan sebagai sikap untuk selalu menghindarkan diri dari perbuatan yang

maksiat. Sedangkan peupeuhan atau pukulan ditafsirkan sebagai kekuatan di dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam filosofi itu, menjadi inspirasi, motivasi dan orientasi pembangunan Kabupaten Cianjur yakni mewujudkan kehidupan yang Sugih Mukti dan Islami sehingga dapat diwujudkan kondisi masyarakat Cianjur yang Baldattun Thoyyibatun Warobbun Gofur dengan ciri utamanya adalah berkah Allah yang berwujud masyarakat adil makmur di bawah ampunan Illahi.

#### 2.2.5 Pertahanan dan Keamanan.

Situasi politik yang terjadi pada saat ini dapat menimbulkan kendala bagi tercapainya rasa aman dan tentram bagi masyarakat, bahkan bila berkelanjutan diawatirkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan NKRI. Berkembangnya konflik vertikal maupun horizontal sebagai dampak kondisi perekonomian yang belum pulih sangat menyulitkan kehidupan rakyat. Kondisi tersebut dapat mendorong timbulnya perilaku anarkhis, destruktif, dan tindakan otorianisme di kalangan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu proses penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Kondisi pertahanan dan keamanan di Kabupaten Cianjur relatif cukup baik. Secara institusional unsur-unsur pertahanan dan kamtibmas seperti TNI dan Polri sudah ada sampai ke tingkat kecamatan/desa. Terdapat pula Yonif 147 dan Satuan Armed yang memperkuat pertahanan dan keamanan di Kabupaten Cianjur. Masalah yang perlu diantisipasi adalah “ *Infiltrasi di Cianjur* “ misalnya kebudayaan asing masuk ke Cianjur yang tidak sesuai dengan budaya lokal, semakin maraknya produk-produk luar negeri yang dapat menggeser produk lokal Cianjur di pasaran dan lain sebagainya. Juga masalah kenakalan remaja, curas, curanmor dan narkoba yang merupakan tanggung jawab kita semua (Aparat keamanan, Pemerintah dan Masyarakat). Masalah lain yang juga harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah pertahanan dan keamanan perairan laut. Di wilayah Cianjur terdapat 75 km pantai Cianjur selatan khususnya di wilayah Kecamatan Sindangbarang dengan sumber daya kelautannya yang cukup potensial. Daya antisipasi masyarakat pantai di wilayah Cianjur selatan, khususnya di Kecamatan Cidaun, Sindangbarang dan Agrabinta dalam menjaga

potensi sumber daya kelautan Cianjur selatan belum cukup baik. Karena masalah ekonomi yang masih memprihatinkan, pada umumnya masyarakat pantai selatan masih memfokuskan perhatiannya kepada usaha-usaha ekonomi penangkapan ikan di laut. Sedangkan ancaman-ancaman yang mungkin terjadi antara lain masuknya intervensi kapal-kapal asing dalam penangkapan ikan. Bahkan bukan hal yang mustahil masuknya kapal-kapal asing yang mengganggu kedaulatan serta pertahanan dan keamanan wilayah perairan Samudera Indonesia khususnya wilayah Pantai Selatan Cianjur.

#### 2.2.6 Agama

Pembangunan agama sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pengamalan Sila Ketuhanan YME. Dengan demikian, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan pengalaman agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas, sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material-spiritualnya.

Patut diketahui, bahwa sebanyak 1.931.394 jiwa atau 99,23 % dari total penduduk Kabupaten Cianjur tercatat sebagai pemeluk agama Islam dan sekitar 11.454 jiwa atau 0,77 % yang tercatat sebagai penduduk nonmuslim dengan rincian : Protestan sebanyak 6.693 jiwa, Katolik sebanyak 3.592 jiwa, Hindu sebanyak 2.109 jiwa, Budha sebanyak 2.463 jiwa dan lainnya 154 jiwa.

Pembangunan agama telah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek pembangunan. Pembangunan bidang agama melalui pembinaan kerukunan hidup beragama telah berhasil ikut serta mencegah terjadinya konflik-konflik sosial. Di samping itu dalam aspek pelayanan terus dilakukan melalui upaya pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah dan sarana keagamaan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman ajaran agama telah dilakukan pula bimbingan, penyuluhan dan penerangan agama dan pembinaan keluarga harmonis ( sakinah ).

Kerukunan hidup beragama tercermin dalam keseharian kegiatan ibadah, baik intern umat beragama maupun antarumat bergama. Kehidupan beragama dan Sikap toleransi beragama tercermin dalam kegiatan hari-hari besar masing-masing umat yang berjalan dengan aman, tenang dan damai. Misalnya dalam kegiatan Bulan Puasa dan Idul Fitri, kegiatan Hari Natal, Kegiatan Hari Raya Ummat Budha, Hindu dan agama lainnya berlangsung dalam suasana dan semangat saling menghormati.

Sarana dan sumber daya manusia Agama Islam di Kabupaten Cianjur saat ini tercatat 4.462 buah Masjid Jami, 1.3850 buah Musholla/Langgar dan 663 buah Pondok Pesantren. Terdapat pula 4.169 ulama, 4.046 Juru Dakwah, 9.965 orang khatib Jum'ah dan 510 orang Penyuluh Penerangan Agama Islam.

### BAB III VISI DAN MISI KABUPATEN CIANJUR

Kabupaten Cianjur telah memiliki **Program Pembangunan Daerah (PROPEDA)** yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 A Tahun 2000. Di dalam Propeda 2001-2005 telah digariskan 4 agenda kebijakan yang merupakan prioritas pembangunan daerah yakni:

- 1) Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Bersih serta Kehidupan Berdemokrasi.
- 2) Upaya Pemulihan Ekonomi.
- 3) Memperkuat Landasan dan Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan.
- 4) Membangun Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Budaya.

Bertitik tolak dari kondisi umum, Kabupaten Cianjur membangun visi dan misi pembangunan yang selaras dengan visi dan tujuan pembangunan regional dan nasional serta sesuai pula dengan situasi kondisi serta posisi Kabupaten Cianjur dalam hubungannya dengan daerah lain.

Dalam jangka panjang masyarakat Kabupaten Cianjur berkeinginan untuk mewujudkan tatar *Cianjur yang Sugih Mukti dan Islami didukung oleh masyarakat religius, madani dan berbudaya tinggi* dengan meningkatkan kualitas akhlak sebagai akar utama mutu sumber daya manusia.

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, visi yang ingin diwujudkan dan misi yang dijalankan sebagai penjabaran lebih kongkret dan operasional tahunan, telah dituangkan dalam Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 08 Tahun 2002 Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005.

#### 3.1 VISI

***Terwujudnya Kabupaten Cianjur sebagai salah satu pusat agribisnis dan pariwisata andalan Jawa Barat di era otonomi daerah.***

## 3.2 MISI

Untuk mencapai visi yang ditentukan, telah ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :

- 3.2.1. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar.
- 3.2.2. Mempertahankan dan/atau meningkatkan serta mengefektifkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk meningkatkan ketakwaan dan mutu SDM
- 3.2.3. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah ramping struktur dan kaya fungsi (Rasional, Efektif, Efisien, Realistis dan Operasional) dan menjamin tegaknya hukum.
- 3.2.4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar wilayah/ infrastruktur yang berorientasi pada pemerataan.
- 3.2.5. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Melihat visi dan misi yang ingin dicapai oleh masyarakat Kabupaten Cianjur, maka di dalam pelaksanaannya sangat berkorelasi dengan kepentingan regional maupun nasional. Visi yang ingin diwujudkan sebagai daerah andalan agribisnis menuntut keterbukaan, baik di dalam pengelolaannya maupun di dalam memasarkan hasil-hasilnya. Dukungan dan bantuan yang bersifat investasi, baik regional, nasional bahkan internasional menuntut kesiapan jajaran aparat dan masyarakat Cianjur untuk menerima berbagai konsekuensi keterikatan pengaruh globalisasi. Demikian pula visi yang ingin diwujudkan sebagai daerah pariwisata andalan, pada gilirannya bukan saja membutuhkan investasi, melainkan juga akan meningkatkan kunjungan-kunjungan wisatawan-wisatawan mancanegara, di samping wisatawan Nusantara dengan berbagai dampaknya terhadap perubahan sosial masyarakat sehingga harus memiliki ketahanan budaya.

Hal lain yang patut menjadi perhatian dalam kaitannya dengan visi yang ingin diwujudkan adalah harus tumbuhnya rasa memiliki dan rasa ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerah dalam arti daerah Kabupaten Cianjur. Meskipun untuk tahap awal daerah-daerah yang menjadi objek pengembangan agribisnis dan pariwisata ini masih terbatas pada kecamatan-kecamatan tertentu yang memang selama ini memiliki potensi cukup besar, tidak berarti kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Cianjur tidak terikat tanggung jawab di dalam menyukseuskannya. Kecamatan mana pun yang karena potensinya memang dimungkinkan untuk dijadikan sentra pengembangan agribisnis dan pariwisata, tetap merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Cianjur sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur harus terikat oleh rasa memiliki dan rasa ikut bertanggung jawab di dalam menyukseuskannya.

Dengan pokok-pokok pemikiran itu, maka keberhasilan di dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Cianjur, baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah, perlu didukung oleh kesiapan aparat dan masyarakatnya dengan wawasan kebangsaan yang mantap didukung oleh kekuatan iman dan kemuliaan akhlak.

**BAB IV**  
**ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL**

**4.1 Analisis Internal**

4.1.1 Kekuatan

4.1.1.1 Jumlah Penduduk 1.931.840 jiwa dan luas wilayah Kabupaten Cianjur 350.148 hektar dengan berbagai potensi sumber daya alam, khususnya di bidang pertanian merupakan sumber kehidupan masyarakat.

4.1.1.2 Budaya paternalistik dan sifat/sikap kegotongroyongan masyarakat terpelihara dengan baik.

4.1.1.3 Kerukunan hidup antarumat beragama dan kerukunan sosial ( antar Suku, RAS, Golongan ) terpelihara dengan baik.

4.1.2 Kelemahan

4.1.2.1 Mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Cianjur belum optimal ditandai dengan masih rendahnya indikator-indikator pencapaian pendidikan dan kesehatan.

4.1.2.2 Belum terciptanya pemerataan infrastruktur pembangunan antara wilayah Cianjur utara dengan wilayah Cianjur selatan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan.

4.2.2.3 Pemahaman terhadap budaya hukum dan politik masih relatif rendah

**4.2 Analisis Eksternal**

4.2.1 Peluang

- 4.2.1.1 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, membuka peluang dan kesempatan bagi daerah untuk berprakarsa dalam membangun kehidupan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- 4.2.1.2 Keanekaragaman sumber daya alam dalam lingkup pertanian, kelautan dan pertambangan merupakan daya tarik penanaman modal/Investasi bagi kalangan dunia usaha/swasta/masyarakat
- 4.2.1.3 Kemajuan-kemajuan dan hasil-hasil yang dicapai dari pembangunan, menjadikan adanya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.

#### 4.2.2 Ancaman

- 4.2.2.1 Penafsiran yang keliru atas otonomi daerah dengan berbagai kewenangan yang diperoleh sebagai konsekuensi dari asas desentralisasi, dapat menimbulkan fanatisme kedaerahan
- 4.2.2.2 Globalisasi dengan berbagai dampak negatifnya dapat berbenturan dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa Indonesia
- 4.2.2.3 Kondisi ekonomi dan politik nasional yang belum stabil secara tidak langsung berpengaruh kurang menguntungkan pada sendi-sendi kehidupan masyarakat di daerah.

## **BAB V TUJUAN DAN SASARAN**

Dengan mengacu dan mempedomani Propeda dan Renstra Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005, khususnya kebijakan dalam membangun kehidupan berdemokrasi, maka tujuan dan sasaran dalam Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Cianjur sebagai berikut :

### **5.1 Tujuan**

- 5.1.1 Terciptanya stabilitas sosial politik yang kondusif
- 5.1.2 Mantapnya kesadaran dan tanggung jawab atas Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia.
- 5.1.3 Terpeliharanya budaya musyawarah dan mufakat .
- 5.1.4 Terjalinnnya komunikasi yang dilandasi semangat kekeluargaan dan persaudaraan di kalangan aparat dan masyarakat
- 5.1.5 Terpeliharanya kerukunan sosial sebagai salah satu pilar penopang keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5.1.6 Terwujudnya nilai-nilai kebangsaan sebagai landasan juang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan

### **5.2 Sasaran**

- 5.2.1 Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan minimal 85 % dari jumlah penduduk Usia Sekolah dan Usia Kerja di Kabupaten Cianjur.
- 5.2.2 Terhindarkannya konflik-konflik vertikal dan horizontal dalam penyelesaian masalah pembangunan maupun kemasyarakatan.
- 5.2.3 Terjalinnnya sinergitas pembinaan masyarakat yang berakhlakul karimah dan berwawasan kebangsaan.

## BAB VI STRATEGI

Dengan diketahuinya faktor-faktor eksternal dan internal, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran, diperlukan strategi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Operasional dalam bentuk Program dan Kegiatan. *Program* merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan. *Kegiatan* adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program.

Dengan telah ditentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pemantapan Wawasan Kebangsaan ini, maka strategi yang ditetapkan mencakup:

### 1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya pemasyarakatan dan penyebarluasan Wawasan Kebangsaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat guna menunjang action plan yang telah ditetapkan.

### 2. Pemantapan

Pemantapan sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang diperlukan guna meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia, aparat dan masyarakat agar mampu menunjang implementasi program pembinaan Wawasan Kebangsaan.

### 3. Pembudayaan

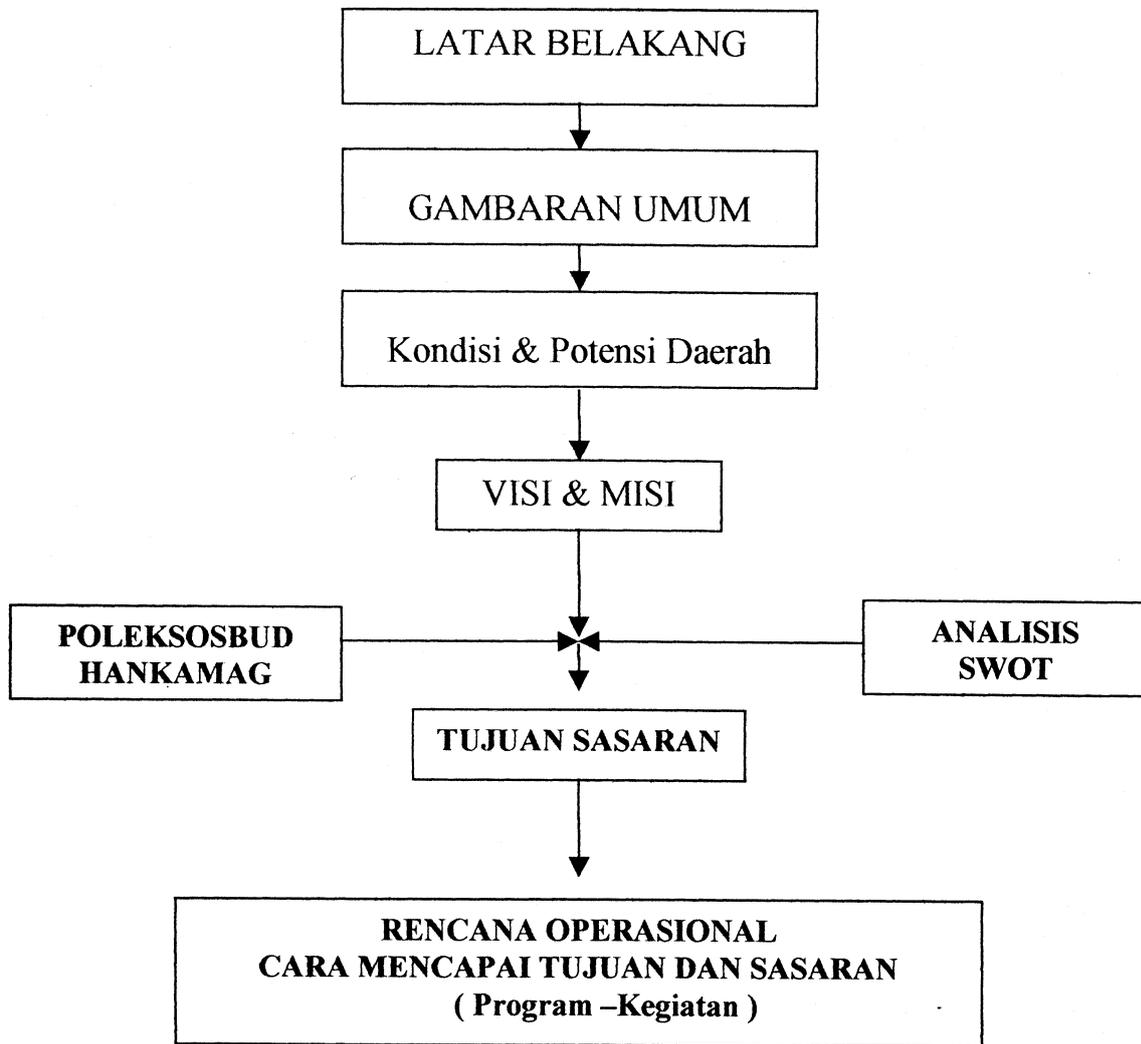
Suatu kondisi masyarakat yang sudah mengamalkan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah merupakan bagian yang menyatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, maka langkah-langkah konkretnya dituangkan ke dalam rencana operasional berupa program dan kegiatan sebagai berikut :

44

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
1	Sosialisasi	a. Rekrutmen	1. Seleksi pemapar. 2. Pelatihan pemapar 3. Pengangkatan pemapar.
		b. Pembuatan Materi	1. Penyusunan modul 2. Penggandaan
		c. Sistem	1. Penyusunan metode dan mekanisme sosialisasi. 2. Penetapan prioritas sasaran/objek. 3. Penetapan waktu dan tempat.
		d. Legitimasi	1. Penyusunan pedoman pelaksanaan sosialisasi. 2. Pengesahan/Legitimasi
		e. Sumber Daya	1. Pengadaan sarana/prasarana kegiatan. 2. Pengadaan dana
2	Pemantapan	a. Peningkatan Sumber Daya	1. Peningkatan penyegaran pemapar. 2. Diversifikasi sarana/prasana dan dana.
		b. Peningkatan Sistem	1. Pengkayaan/diversifikasi metode dan mekanisme. 2. Pengkayaan/diversifikasi materi.
		c. Kelembagaan	1. Pembentukan kelompok diskusi. 2. Pembentukan Lembaga Pengkajian Pemantapan Wasbang.
3.	Pembudayaan	a. Pemantapan Sistem	1. Meningkatkan status legitimasi sistem dan pedoman. 2. Mengembangkan mekanisme Ketatalaksanaan.
		c. Pemantapan Kelembagaan.	1. Peningkatan status hukum dan fungsi lembaga. 2. Membuat LPPW sampai ketingkat desa
		d. Pencanaan Gerakan Cinta Tanah Air.	1. Keteladanan bagi masyarakat. 2. Penyelenggaraan perlombaan yang memberikan penghargaan kepada masyarakat.

### Kerangka Perumusan PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN



BAB VII  
P E N U T U P

Strategi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Cianjur ini harus menjadi komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparat dan masyarakat mengenai tatanan kehidupan berwawasan kebangsaan yang hendak dibangun, dan bagaimana cara mencapainya. Melalui Strategi Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini, kita ingin menjaga dan memelihara stabilitas daerah yang kondusif melalui pemasyarakatan dan pembudayaan nilai-nilai penting wawasan kebangsaan, guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai prinsip dasar dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi.

Sebuah strategi disamping diukur oleh baiknya niat dan semangat yang diungkap lewat bahasa tertulis, tergantung juga kemampuan di dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, strategi ini harus dilaksanakan dengan system dan metoda yang efektif serta dapat menyentuh dan membangun kesadaran jajaran aparat dan segenap lapisan masyarakat. Demikian pula, Strategi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Cianjur ini harus tetap respons terhadap perkembangan yang terjadi dalam kaitannya dengan keadaan masa depan. Untuk itu, penyesuaian-penyesuaian di dalam pelaksanaannya sangat dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan pokok-pokok strategi yang telah ditetapkan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan meridhoi segala daya dan ihtiar kita.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 25 Mei 2004  
**BUPATI CIANJUR,**

Cap/ttd. -

**WASIDI SWASTOMO**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Mei 2004  
SEKRETARIS DAERAH  
**SETDA**  
**SUBARNA**  
Pemula Utama Muda  
NIP. 480 061 022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 14 TAHUN 2004  
SERI D3.